

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hutan di Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan hujan tropisnya (*Rain Forest*) di Kalimantan dan Papua. Hutan sangat penting bagi kehidupan di masa depan, namun saat ini begitu memprihatinkan mengingat laju kerusakan hutan di Indonesia yang begitu cepat (Arifin, 2018). Kerusakan hutan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perubahan iklim yang ada di dunia saat ini, perubahan iklim ini sangat mengkhawatirkan negara-negara lain di karenakan dampak negatif yang di timbulkan. Dalam mengatasi perubahan iklim semua pihak bertanggung jawab dalam mengatasi masalah ini secara bersama, bukan hanya negara berkembang tetapi juga negara maju dan oleh karena itu penelitian ini akan fokus membahas peran Pemerintah Jerman melindungi hutan untuk mitigasi perubahan iklim melalui program Forclime di Kabupaten Kapuas Hulu (Indonesia) periode 2010-2018.

Seperti penjelasan sebelumnya perubahan iklim yang terjadi saat ini sangat mengkhawatirkan negara-negara yang ada di dunia termasuk Indonesia. Perubahan iklim atau *climate change* adalah kenaikan suhu permukaan bumi yang disebabkan oleh peningkatan emisi karbon dioksida dan gas-gas lain yang dikenal sebagai gas rumah kaca yang menyelimuti bumi dan memerangkap panas (WWF Indonesia, t.thn.). Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia umumnya ditandai adanya perubahan temperatur rerata harian, pola curah hujan, tinggi muka laut, dan

variabilitas iklim (misalnya El Nino dan La Nina, Indian Dipole, dan sebagainya). Perubahan ini memberi dampak serius terhadap berbagai sektor di Indonesia, misalnya kesehatan, pertanian, perekonomian, dan lain-lain (Supangat, 2013).

Jika selama ini sebagian orang beranggapan bahwa perubahan iklim sebagai pemanasan global dan perubahan pola cuaca saja, maka sesungguhnya perubahan iklim lebih daripada itu. Meningkatnya suhu bumi menyebabkan es-es di kutub mencair, akibatnya muka air laut terus naik dan perlahan menggenangi daratan, pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Deputy Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan pada Antara News Bulan November 2011, sampai saat ini setidaknya Indonesia telah kehilangan 29 ribu hektar daratan akibat kenaikan muka air laut (Anshary, 2018).

Secara global, hampir seperlima dari emisi gas rumah kaca terkait dengan hutan, hutan sendiri memiliki definisi hamparan lahan dengan luas minimum 0,25 hektar yang ditumbuhi vegetasi berkayu (pohon) berbagai jenis dan umur yang tajuknya menutup hamparan tersebut minimum 30% (Development & Natural, 2013, hal. 9). Sedangkan menurut Greenpeace penyebab utama terjadinya perubahan iklim yang terjadi di dunia saat ini juga akibat dari *deforestasi* atau pengunduluan hutan, kita membutuhkan hutan dengan luasan besar untuk meredam dan melawan perubahan iklim dan menjaga bumi, akan tetapi yang terjadi kita melakukan sebaliknya, kita menghancurkan hutan (Greenpeace Indonesia, t.thn.).

Tingginya laju *deforestasi* hutan di Indonesia ini membuat *Guinness Book of World Records* kembali menganugrahi Indonesia sebagai negara dengan tingkat *deforestasi* tercepat di dunia, dengan tingkat kehilangan lahan hutan sekitar setara 300 kali lapangan sepak bola setiap jamnya (Purwaningsih, 2018). Sebelumnya Indonesia juga pernah tercatat didalam *Guinness Book of Records*, berdasarkan laporan Greenpeace yang melayangkan surat kepada pihak

*Guinness Book of Records* tahun 2007, Indonesia tercatat sebagai negara yang laju kerusakan hutannya tercepat di dunia. Sebuah prestasi yang tidak patut untuk dibanggakan, bagaimana tidak data yang dikeluarkan oleh *State of the World's Forests 2007* yang dikeluarkan *The UN Food & Agriculture Organization* (FAO), angka *deforestasi* Indonesia pada periode 2000-2005 adalah 1,8 juta hektar/tahun angka ini merupakan angka tertinggi di dunia (Umi, 2007).

Tingginya angka kerusakan hutan setiap tahunnya cukup mengkhawatirkan negara-negara lain, terutama hutan Indonesia yang dapat dikatakan telah menjadi salah satu paru-paru dunia (Jemadu, 2008). Pada bulan November 2017 lalu perwakilan pemerintah Indonesia berpartisipasi dalam Pertemuan Para Pihak ke-23 COP23 atau konferensi pengendalian perubahan iklim PBB, konferensi tahunan yang dihadiri perwakilan 197 negara yang tergabung dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. COP23 dipimpin oleh Fiji, tapi konferensinya diadakan di Bonn, Jerman. Sebagai negara yang termasuk ke dalam lima besar penyumbang gas rumah kaca terbesar di dunia, Indonesia telah menyelesaikan dokumen kontribusi nasional (*Nationally Determined Contribution atau NDC*) dengan komitmen menurunkan emisi pada 2030 sebesar 29% dengan usaha sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional (Wijaya & Chrysolite, 2017).

Perubahan iklim pada saat ini membahayakan perkembangan menuju pembangunan milenium yang telah disepakati secara internasional. Dalam mengatasi perubahan iklim dan menjaga hutan, Indonesia tidak sendiri, akan tetapi di bantu beberapa negara maju salah satunya Jerman. Oleh karena itu perubahan iklim menjadi fokus utama kerjasama pembangunan Jerman dan merupakan area prioritas dalam kerjasama dengan Indonesia. Kedua negara telah menghasilkan suatu kemitraan strategis terkait dengan perubahan iklim pada tahun 2007, dengan fokus pada tiga hal, yaitu: hutan, emisi di perkotaan dan energi panas bumi, terkait dengan kehutanan, Jerman mendukung upaya Indonesia untuk mengurangi emisi

gas rumah kaca dari sektor ini, dan melaksanakan pengelolaan hutan lestari untuk kepentingan rakyat. Tindakan langsung Jerman akan terpusat dalam membantu kesiapan Indonesia dalam melaksanakan mekanisme *REDD* masa depan. *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)* adalah langkah-langkah yang didesain untuk menggunakan insentif keuangan untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Bank Pembangunan Jerman KfW akan memberikan bantuan untuk Modul Kerjasama Keuangan, proyek *Forclime* (hibah senilai 20 juta Euro) yang dibiayai oleh Kementerian Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan BMZ (FORCLIME, t.thn.).

Pemerintah Jerman sebagai mitra kerja sama Pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim merupakan salah satu negara maju yang menjadi pelopor dalam perubahan iklim dunia internasional, Jerman merupakan negara yang berpengalaman dalam mengatasi perubahan iklim dan pelestarian alam dan ini didasari fakta bahwa perlindungan perubahan iklim dan pelestarian alam sudah lama di anggap penting di Jerman. Dan ini dapat berdampak positif dalam membantu Pemerintah Indonesia memenuhi target mengurangi emisi gas rumah kaca, dan terlebih lagi Jerman merupakan negara pertama di dunia yang merumuskan prinsip-prinsip dan target kebijakan iklim dalam jangka panjang. Hingga tahun 2017 Jerman berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 28 % dari target 55 % di tahun 2050. Dan ini melebihi target berdasarkan Protocol Kyoto yaitu sebesar 21% pada periode 2008-2012 lalu (Fakta Mengenai Jerman, t.thn., hal. 78-92). Hutan Indonesia di anggap begitu penting bagi pemerintah Jerman dan bahkan negara-negara yang membantu Indonesia dalam mengatasi perubahan Iklim seperti Jepang dan Norwegia , hutan Indonesia memiliki peran penting dalam mengatasi perubahan iklim menurut data FAO tahun 2010, hutan Indonesia secara total menyimpan 289 gigaton karbon, akan tetapi di sisi lain deforestasi hutan di Indonesia salah satu yang tertinggi di Dunia (Samsuardi, t.thn.). Melihat potensi Hutan yang begitu besar dimiliki Indonesia dan untuk

keberlangsungan kehidupan bukan hanya Indonesia saja tetapi juga dunia di masa depan, menyadarkan negara maju untuk secara bersama membantu menjaga hutan di Indonesia.

Hubungan diplomatik Indonesia–Jerman dibuka secara resmi pada tahun 1952 (KBRI Berlin, t.thn.). Kerja sama antara pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia, yang mana Indonesia sebagai negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca, walaupun tuduhan mengenai penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar ketiga didunia, di bantah oleh kepala BMKG sebagai tuduhan internasional, alasannya Indonesia membuktikan data kenaikan  $CO_2$  yang 1,94 ppm sejak 1996 sampai 2018 itu ternyata di bawah rata-rata kenaikan dunia yang mencapai dua koma sekian ppm, artinya masih di bawah rata-rata berarti bukan kontributor nomor tiga di dunia (Wijayaka, 2018). Akan tetapi terlepas dari benar tidaknya anggapan tersebut, kenaikan konsentrasi  $CO_2$  di Indonesia memiliki kecenderungan yang terus naik dari waktu ke waktu.

Pemerintah Jerman sebagai negara maju telah sepakat bekerja sama untuk mendukung upaya Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari *deforestasi* dan degradasi hutan. Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman ini dilaksanakan dalam *Program Forest and Climate Change Programme*. *Forclime* di sepakati antara Indonesia dan Jerman dengan negoisasi bilateral *G to G* pada Bulan Oktober 2007 setelah pertemuan COP KE 13 yang di selenggarakan di Bali (Suningsih, 2014, hal. 6-7). Tujuan menyeluruh program ini adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan sekaligus meningkatkan mata pencaharian masyarakat desa miskin Indonesia. Dalam rangka mencapai sasaran ini, tim program ini akan membantu Pemerintah Indonesia merancang dan mengimplementasikan reformasi hukum, kebijakan dan kelembagaan untuk pelestarian dan pengelolaan hutan yang lestari, pada tingkat lokal, provinsi dan nasional dengan bantuan teknis. Bantuan pembangunan demonstrasi kegiatan *REDD* merupakan fokus utama dari

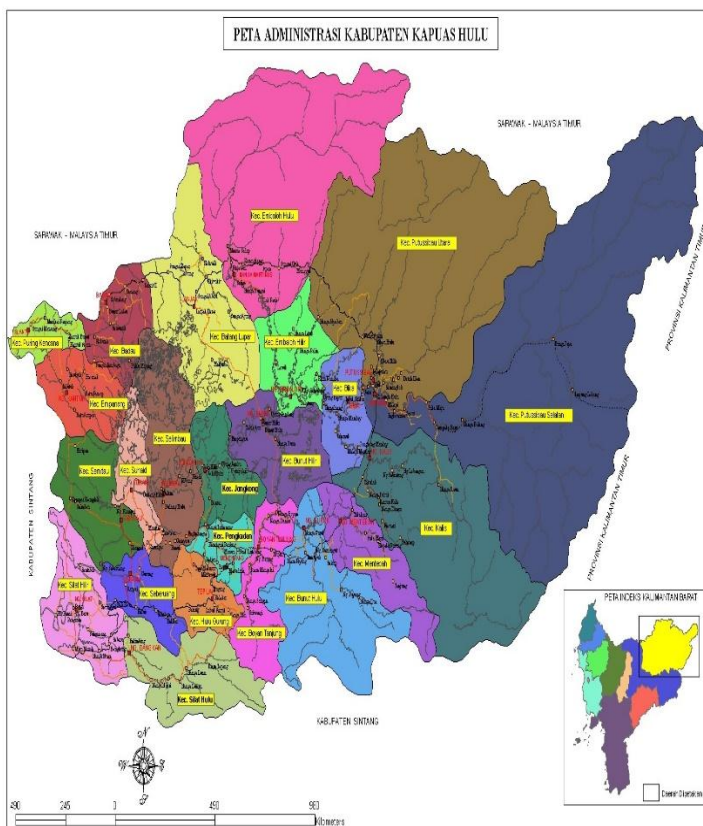
Program ini, yakni dengan memberikan pengalaman kepada para pengambil keputusan tentang bagaimana *REDD* dapat diimplementasikan di lapangan (FORCLIME, t.thn.).

Setelah melalui proses yang cukup panjang, perumusan rancangan program *Forclime* modul kerja sama *financial* dapat terselesaikan dan saat ini memasuki tahap pelaksanaan program dengan target yang cukup ambisius yaitu membangun setidaknya satu *DA REDD* di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat, Kabupaten Melinau dan Kabupaten Berau di Kalimantan timur. Sebagai program yang didukung langsung oleh pemerintah Jerman dalam implementasikan skema di Indonesia, *REDD+* merupakan satu dari beberapa skema yang hangat diperdebatkan dalam putaran perundingan perubahan iklim, tanda (+) di artikan sebagai meningkatnya cadangan karbon hutan. Skema ini awalnya dirancang oleh Papua Nugini dan Kosta Rika, dua negara pemilik hutan tropis. *REDD+* berdasarkan pada gagasan sederhana: memberi imbalan kepada siapapun yang berupaya mengurangi emisi karbon. Seperti halnya ide-ide sederhana lain, ternyata sangat sulit membuat ide ini menjadi kenyataan. Perlahan-lahan muncul kebingungan menyangkut kelayakan dan dampak negatif *REDD+* yang mungkin timbul bagi pemilik hutan tropis yang merasa tidak mendapat keuntungan apapun dari skema perubahan iklim (Development & Natural, 2013, hal. 6).

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu tujuan program *Forclime* di Kalimantan, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu daerah yang memiliki areal hutan cukup luas. Oleh karena itu sering dijuluki sebagai "*The Heart of Borneo*". Areal hutan yang dimiliki cukup menjanjikan untuk kemajuan Kabupaten Kapuas Hulu di masa yang akan datang. Keberadaan Taman Nasional di Kabupaten Kapuas Hulu (Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun) merupakan suatu kebanggaan karena merupakan aset nasional bahkan internasional yang telah dapat memberikan kontribusi manfaat jasa lingkungan yang besar baik secara lokal maupun global, sehingga keberadaannya perlu dilestarikan. Di sisi lain bagi masyarakat di sekitar hutan, Taman Nasional di

Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan areal hutan yang luas tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat besar dan diyakini sebagai warisan dari nenek moyang leluhur mereka (Kabupaten Kapuas Hulu, 2013). Kapuas Hulu memiliki geografis yang sulit di tempuh. Jalan lintas kalimantan bukanlah jalan yang mudah, jalan menuju Kapuas Hulu adalah kombinasi kepriawaian supir menghindari jebakan dan keikhlasan penumpang terhadap guncangan-guncangan yang melelahkan. Dibutuhkan lebih dari 15 jam dengan kendaraan umum dari Ibu Kota Kalimantan Barat, Pontianak untuk menuju daerah penempatan di Kapuas Hulu (Indonesia Mengajar, t.thn.).

## 1.1 Gambar Peta Administrasi Kapuas Hulu :



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu



Dalam menjalankan program, *Forclime* harus menghadapi kendala yang dapat menghambat jalannya program alasannya banyak masyarakat setempat yang bermukim di wilayah hutan di Kapuas Hulu dan masuk dalam kawasan Hutan Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum, menurut Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kapuas Hulu Budi Prasetyo kepada Antara di Putussibau, Kapuas Hulu setidaknya Sebanyak 70 desa, 138 dusun, dan 20 kampung di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, masuk dalam kawasan hutan dengan luas sekitar 31.162 kilometer persegi. Puluhan desa dan ratusan dusun itu masuk dalam kawasan hutan, baik kawasan Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum, maupun kawasan hutan lindung, hutan produksi, serta kawasan hutan konversi di jelaskan Budi, penetapan kawasan hutan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 733/Menhut - II/2014. Penetapan Kawasan Hutan tersebut menjadi masalah bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan karena tidak bisa memiliki sertifikat kepemilikan tanah (Timotius, 2017).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dan uraian-uraian sebelumnya, maka dalam penelitian ini secara khusus pokok permasalahan yang ingin di bahas penulis adalah sebagai berikut: “Bagaimana peran Pemerintah Jerman melalui *Forclime* membantu Pemerintah Indonesia dalam melindungi hutan untuk mitigasi perubahan iklim di Kalimantan, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu?”

### **C. Kerangka Berpikir**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ingin di bahas, maka penulis mencoba mengkaji permasalahan tersebut dengan menggunakan konsep kerja sama internasional dan konsep bantuan luar negeri:

#### **1. Konsep Kerja Sama Internasional**

Di dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional tidak lepas isu-isu tentang kerja sama internasional yang sering kali muncul di dalam hubungan antar negara. Kerja sama internasional terbentuk karena adanya saling ketergantungan antara negara satu terhadap negara lainnya. Di dalam melakukan kerja sama internasional setiap negara memiliki tujuan yang ingin di peroleh masing-masing negara yang melakukan kerja sama, tujuan tersebut di tentukan masing-masing pihak pemerintah suatu negara yang terlibat dan bertujuan untuk memperoleh kebutuhan rakyat dan negara yang melakukan kerja sama (Banyu & Mochammad, Pengantar Hubungan Internasional, 2006, hal. 23).

Pada era sekarang ini suatu negara tidak lepas dari adanya kerja sama internasional alasannya di latar belakang karna kebutuhan suatu negara itu sendiri, dalam memenuhi kebutuhan misalnya perkembangan dan kemajuanpun membutuhkan dari adanya kerjasama internasional. Proses kerjasama antara negara satu terhadap negara yang lain biasanya terbentuk oleh berbagai faktor seperti faktor nasional, regional atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara (Holsti, 1993, hal. 652-653). Di dalam melakukan kerja sama internasional tentu tidak lepas juga dari kepentingan nasional suatu bangsa yang ingin di peroleh, di dalam hal ini tentu perlu adanya suatu kerja sama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara (Sjamsumar & Riswandi, 1995, hal. 15), seperti halnya Indonesia yang menerima Jerman sebagai salah satu mitra pembangunan dalam kerja sama internasional yang fokus dalam perubahan iklim dari sektor kehutanan, Indonesia mempunyai

kepentingan sendiri dari adanya kerjasama yang terjalin yang mana kepentingan tersebut adalah pengalaman Jerman sebagai negara maju dan pelopor dari perubahan iklim dunia dapat berdampak positif dalam upaya membantu pemerintah Indonesia menggapai target menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 % pada tahun 2030 mendatang. Secara singkat kerja sama internasional dapat diartikan sebagai kerjasama yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing bangsa, untuk bantu membantu, mengatur batas-batas kekuasaan suatu bangsa, tukar menukar utusan dan lain sebagainya (Gunawan W. , 1988, hal. 53). Dan berikut merupakan definisi dari para ahli mengenai apa itu yang dimaksud kerja sama internasional.

Menurut J. Frankle tentang definisi kerja sama:

*“Kerjasama merupakan identifikasi dari sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, dengan katalain kerjasama merupakan suatu hubungan yang teridentifikasi dari sasaran bersama dengan menggunakan metode tertentu untuk mencapai tujuan kerjasama tersebut”*  
(Suryadi, 2015, hal. 10)

Menurut Joseph Greico tentang kerja sama internasional :

*“Kerjasama internasional hanya berlangsung jika ada kepentingan objektif dan oleh karena itu kerjasama akan berakhir jika kepentingan objektif ini berubah. Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks berbeda, kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi langsung di antara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama secara bersamaan, bentuk kerjasama lainnya yang dilakukan oleh negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional”*  
(Greico, 1990).

Seperti yang sudah di paparkan oleh para ahli di atas bahwa munculnya kerja sama internasional dapat di simpulkan, setiap negara yang akan melakukan kerja sama mempunyai

kepentingan bersama yang ingin di peroleh atau tujuan yang ingin dicapai oleh negara-negara yang melakukan kerja sama. Suatu negara tidak akan melakukan kerja sama internasional jika konsekuensi dampak lebih besar jika di bandingkan manfaat yang di peroleh suatu negara. Kerja sama Internasional yang terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Jerman terjadi di latar belakang karna Pemerintah Jerman memiliki permasalahan yang sama mengenai Perubahan Iklim yang ada di Indonesia, dalam mengatasi permasalahan yang sama Pemerintah Jerman menawarkan program kepada Pemerintah Indonesia yaitu Program Forests and Climate Change yang berfokus mengatasi perubahan iklim yang di sebabkan oleh hutan dengan mengimplementasikan skema REDD di Indonesia.

Dengan suatu negara melakukan kerja sama internasional maka negara tersebut memainkan peran politiknya terutama politik luar negeri. Menurut bidangnya kerja sama internasional di bagi lagi menjadi dua yaitu kerja sama bilateral dan multilateral:

Menurut Kusumohamidjojo hubungan bilateral adalah:

*“suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi”* (Kusumohamidjojo, 1987, hal. 3).

Sedangkan dalam buku yang berjudul kamus politik internasional, Didi Krisna mendefinisikan konsep tentang hubungan bilateral adalah sebagai berikut:

*“hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara)”* (Krisna, 1993, hal. 18).

Sedangkan kerja sama multilateral adalah kerja sama yang dilakukan oleh lebih dua negara yang dilakukan dari seluruh dunia (Safitri, 2011, hal. 89-107).

Hubungan kerja sama internasional yang terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman jika di persempit menurut bidangnya merupakan hubungan bilateral yang dilakukan bersama antar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK) dan Kementerian Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Alasan lain penulis menjadikan konsep kerja sama internasional untuk mengkaji permasalahan penelitian di latar belakang Jerman salah satu Negara Eropa yang merupakan mitra kerja sama pembangunan bagi Pemerintah Negara Indonesia, berkomitmen dalam membantu penetapan target pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia, sedangkan di waktu bersamaan Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% di tahun 2030 dengan 41 % bantuan internasional, dan ini merupakan salah satu contoh kerja sama internasional dari segi ketergantungan suatu negara terhadap negara lain dalam upaya menyelesaikan permasalahan yaitu menurunkan emisi gas rumah kaca. Dan kerja sama ini di tandai dengan terbentuknya program *Forest and Climate Change* dan kerja sama ini juga di dukung langsung oleh kementerian kerja sama ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ).

## **2. Konsep Bantuan Luar Negeri**

Bantuan luar negeri atau bisa di sebut juga sebagai bantuan pembangunan, merupakan salah satu instrumen umum yang banyak digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri, terutama sejak akhir Perang Dunia II. Bantuan sebagian besar terdiri dari transfer uang, barang atau jasa dari satu negara ke negara lain. Bantuan militer dan bantuan pangan adalah salah satu bentuk awal dari bantuan luar negeri. Di dekade terakhir proyek bantuan dengan tujuan meningkatkan infrastruktur di negara penerima telah menjadi semakin umum (Lengauer, 2011, hal. 3). Bantuan luar negeri menjadi fenomena penting dalam kancah perpolitikan dunia. Pada era perang

dingin, bantuan luar negeri menjadi media politik bagi negara-negara besar untuk menyebarkan ideologinya. Kondisi tersebut terus berlanjut seiring fenomena globalisasi. Terdapat berbagai pergeseran kepentingan dalam bantuan luar negeri. Muncul motif kemanusiaan dalam bantuan luar negeri, sekalipun tidak melepas kemungkinan adanya tendensi kepentingan politik di baliknya (Khurun'in, 2015).

Definisi singkat, bantuan luar negeri adalah salah satu instrumen kebijakan yang tidak jarang digunakan dalam hubungan internasional. Secara umum bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai transfer sumber daya satu pemerintah ke pemerintah lain yang dapat berbentuk barang atau jasa (Banyu & Mochammad, Pengantar Hubungan Internasional, 2006, hal. 81) .

Menurut Lancaster tentang Foreign Aid:

*“Foreign aid is defined as a voluntary transfer of public resources, from a government to another independent government, to an NGO, or to an international organization”*

Menurut kutipan Lancaster tersebut, bantuan luar negeri atau *foreign aid* yang biasa disebut sebagai *international aid* dapat di artikan sebagai perpindahan atau transfer sumber daya secara sukarela dari satu negara ke negara lain, baik antar lembaga pemerintah atau non pemerintah. Sumber daya yang dimaksud bisa berupa pemberian baik di bidang ekonomi, militer, teknis dan keuangan yang di berikan di tingkat bilateral maupun multilateral. Selain memberikan keuntungan untuk negara penerima, Lancaster menjelaskan bahwa bantuan luar negeri juga memiliki fungsi lain, seperti tanda persetujuan diplomatik dan menambah kekuatan atau pengaruh di negara penerima, memperluas pengaruh budaya sebagai penghargaan kepada negara lain karena berperilaku sesuai kehendak negara donor, dan sebagai akses usaha untuk mendapatkan akses perekonomian di negara penerima (Sugiarto, 2014, hal. 9).

Dalam rangka mengatasi Perubahan Iklim di sektor kehutanan di Indonesia, *Forests And Climate Change Programe* Pemerintah Jerman memberi Bantuan Luar Negeri

nya kepada Pemerintah Indonesia berupa Bantuan Keuangan dan Tenaga teknis/ ahli dalam rangka mencapai sasaran program. Bantuan Keuangan di maksud dalam kerja sama ini adalah di peruntukan untuk memfasilitasi agar Program-Program yang di jalankan di lapangan dapat berjalan selaras dengan tujuan program *Forclime*, bantuan keuangan tersebut digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa untuk keperluan program. Sedangkan untuk Bantuan Teknis maksud dan tujuan dalam kerja sama ini adalah Pemerintah Jerman menugaskan tenaga teknis /ahli untuk membantu Pemerintah Indonesia merancang dan mengimplementasikan pembentukan dan pembangunan Kelembagaan Kesatuan Pengelola Hutan dan Mendukung pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia. Bantuan tenaga ahli yang di berikan Pemerintah Jerman kepada Indonesia dengan studi kasus di Kabupaten Kapuas Hulu berupa peningkatan kapasitas kepada masyarakat ,membantu Pemerintah Daerah membentuk Lembaga DRK yang bertujuan menyelesaikan Konflik Lahan dan Sumber Daya Alam.

Sebagai negara pelopor perubahan iklim di dunia, Jerman juga ingin menunjukan kepada negara-negara yang tergabung ke dalam 197 negara konvensi kerangka kerja PBB baik itu negara maju atau berkembang tentang perubahan iklim bahwa Jerman dapat menjadi contoh bagi negara-negara maju secara bersama membantu negara-negara berkembang, seperti Indonesia yang tengah menargetkan menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan sebesar 29% di tahun 2030 mendatang. Pemberian bantuan luar negeri hibah 20 juta euro oleh Jerman kepada Indonesia tentunya tidak murni hanya membantu Indonesia tetapi juga memiliki kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai, apalagi jika kita melihat latar belakang sejarah kedua negara bahwa Indonesia merupakan negara yang menjalin persahabatan terlama bagi Jerman di luar Eropa, sehingga bantuan yang diberikan Jerman dapat memperkuat hubungan dengan Indonesia.

Yang menjadi alasan lain penulis memilih konsep bantuan Internasional untuk mengkaji karya ilmiah ini karena, bukanlah hal mudah bagi suatu negara berkembang untuk

menyelesaikan permasalahan perubahan iklim dan gas rumah kaca tanpa bantuan dunia internasional terlebih mengenai perubahan iklim yang menjadi tugas bersama setiap negara, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dalam menangani permasalahan perubahan iklim selama ini menggunakan dana APBD dari alokasi Kementerian Kehutanan, dengan adanya hibah sebesar 20 juta euro yang di berikan Jerman untuk proyek *Forclime* dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan iklim dan gas rumah kaca. Indonesia sebagai negara penerima tentu mendapat keuntungan dari bantuan yang diberikan, sedangkan untuk negara Jerman ini adalah upaya negara tersebut menunjukkan keseriusan kepada dunia internasional bahwa Jerman berperan aktif dalam mengatasi isu iklim global. Dengan demikian bantuan dana hibah yang di berikan Jerman kepada Indonesia sebagai negara penerima haruslah sesuai dengan ekspektasi pemberi donor. Demikian pula dengan dana yang di peroleh melalui pinjaman internasional maupun hibah luar negeri tentu memiliki dampak atau konsekuensi politik maupun ekonomi terhadap Pemerintah Indonesia yang menerima bantuan itu.

#### **D. Argumen Penelitian**

Berdasarkan paparan dan konsep yang di tulis di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan argumen penelitian ini bahwa Peran Pemerintah Jerman melalui *Forclime* membantu Pemerintah Indonesia dalam melindungi hutan untuk mitigasi perubahan iklim di Kalimantan, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu dengan:

1. Membantu menjaga kerusakan hutan di Kabupaten Kapuas Hulu dengan bantuan keuangan guna mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan serta meningkatkan mata pencaharian masyarakat desa miskin di Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Membantu dalam pembentukan dan pembangunan kelembagaan di Kabupaten Kapuas Hulu dengan bantuan teknis untuk pelestarian dan pengelolaan hutan yang lestari.



## **E. Batasan Penelitian**

Agar pembahasan penulis yang di lakukan dapat terarah dengan baik dan tidak menyimpang dari pokok penelitian serta mempermudah dalam penulisan ini, maka penulis membatasi penelitian yang akan di bahas, yaitu membahas mengenai seputar Peran Pemerintah Jerman Melindungi Hutan Untuk Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Program *Forclime* Di Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2010-2018 , serta membahas mengenai capaian dan kendala yang di hadapi selama berjalannya program.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode ini berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*). Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat *fenomenologis* yang mengutamakan penghayatan. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam teknik pengumpulan data yang sering di gunakan oleh penelitian ini adalah, dokumentasi, wawancara, observasi partisipasi. Jadi, peneliti merupakan *key instrument*, dalam mengumpulkan data, si peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif, langkah-langkah penelitian kualitatif sebenarnya tidak ada langkah yang baku dalam penelitian kualitatif Karena langkah-langkahnya tidak linier seperti dalam penelitian kuantitatif, melainkan sirkuler sehingga dapat dimulai dari manapun (Gunawan I. , 2013).

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis akan gunakan adalah teknik mengumpulkan data dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, dalam hal ini penulis mengumpulkan data secara langsung terhadap objek yang akan di teliti, penulis dalam mengumpulkan data akan mewawancarai lembaga/instansi yang terkait dengan pembahasan seperti mewawancarai ketua atau staf yang bertugas di lembaga *Forclime*, Ketua Mediator *Desk Resolusi Konflik*, Dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaen Kapuas Hulu yaitu Bappeda. Sedangkan data sekunder yang penulis maksud data yang di kumpulkan di peroleh dari berbagai macam sumber bacaan seperti dokumen-dokumen dari instansi pemerintah, majalah, publikasi dari berbagai organisasi, hasil hasil studi, hasil survey dan studi historis dan sebagainya. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer dan skunder bertujuan untuk memperlengkap penemuan dan melengkapi informasi yang di peroleh terhadap objek yang di teliti (Moleong, 1999).

### G. Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika yang di tulis dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari sub-sub bab yang di kembangkan yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I. Pendahuluan.**

Merupakan bagian dalam penulisan skripsi yang menjelaskan mengenai latar belakang pengambilan judul skripsi, rumusan masalah yang menjadi fokus penulis, kerangka berpikir untuk mengkaji karya tulis, juga berisi argumen penelitian yang merupakan pemikiran sementara penulis atas jawaban rumusan masalah yang ada, serta metode penelitian yang memberi penulis batasan dalam melakukan penelitian dan terakhir sistematika penulisan. Sistematika bab ini sebagai berikut:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah

- C. Kerangka Berpikir
- D. Argumen Penelitian
- E. Batasan Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

## **BAB II. Kerja Sama Antara Pemerintah Jerman Dan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Perubahan Iklim Dari Sektor Hutan Di Indonesia.**

Bab ini akan menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya *Forests and Climate Change Programme* di Indonesia, menjelaskan bagaimana pendanaan yang di peroleh untuk proyek ini, serta membahas tujuan *Forests and Climate Change Programme* dan juga bagaimana Program ini mendukung implementasian program REDD di Indonesia. Serta tidak lupa membahas mengenai keseriusan Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia dalam menangani isu lingkungan. Sistematika Bab ini sebagai berikut :

- A. Sejarah Terbentuknya Program *Forests And Climate Change* di Indonesia.
- B. Peran Pemerintah Jerman Menangani Isu Lingkungan.
- C. Peran Pemerintah Indonesia Menangani Isu Lingkungan.

## **BAB III. Gambaran Umum Tentang Perubahan Iklim, Hutan Dan Deforestasi di Indonesia .**

Bab ini akan membahas Definisi Perubahan Iklim terlebih dahulu, Pentingnya Perubahan Iklim untuk di bahas serta dampak negatif dari perubahan iklim, selanjutnya Bab ini juga akan membahas mengenai tentang besarnya hutan Indonesia, mamfaat hutan bagi kehidupan masa yang akan datang, beserta ketergantungan masyarakat terhadap hutan, dengan tingkat deforestasi hutan di Indonesia dan Internasional yang tinggi Bab ini juga akan membahas Definisi Deforestasi Hutan dan Besarnya Deforestasi Hutan Indonesia dan Kalimantan Barat. Sistematika Bab ini sebagai berikut :

- A. Isu Perubahan Iklim
- B. Profil Hutan Indonesia

### C. Deforestasi Hutan Indonesia

#### **BAB IV. Peran *Forclime modul Financial (FC) dan Teknis (TC)* Dalam Mengurangi Gas Rumah Kaca Dari Sektor Kehutanan Di Kabupaten Kapuas Hulu.**

Bab ini akan membahas tentang Peran *Forclime modul FC* (Keuangan) dan *TC* (Teknis) dalam mengurangi GRK dari sektor kehutanan sekaligus meningkatkan mata pencaharian masyarakat desa miskin di Indonesia dengan studi kasus di salah satu Areal DA di Indonesia yaitu Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2010 hingga 2018 . Bab ini membahas tentang capaian Program *Forclime modul FC* dan *TC* dalam implementasinya di Kabupaten Kapuas Hulu. Serta akan membahas bagaimana tingkat keberhasilan program yang sudah di laksanakan, kemudian juga bab ini akan membahas mengenai kendala *Forclime modul FC* dan *TC* dalam menjalankan program nya di Kabupaten Kapuas Hulu. Sistematika bab ini sebagai berikut:

- A. Program *Forclime* Di Kabupaten Kapuas Hulu
- B. Capaian dan Kendala Program Periode 2010 hingga 2018 di Kabupaten Kapuas Hulu.

#### **BAB V. Kesimpulan**

